

Demokrat Minta Rekening SKPD Ditertibkan

Yulan Mirza
Borneo Tribune, Pontianak

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar meminta Pemprov nertibkan rekening-rekening SKPD berdasarkan rekomendasi tindakan-lanjuti temuan audit BPK-RI wilayah Provinsi Kalbar.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Setyo Gunawan dalam sidang paripurna padangan akhrit terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2010, Senin (8/8) kemarin.

Setyo Gunawan menguraikan bahwa fraksi demokrat menerima dengan beberapa catatan. Diantaranya, ke depan tahapan pembahasan RAPBD harus sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007, Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan Perda Provinsi Kalbar Nomor 4 tahun 2008.

Setyo melanjutkan, setelah APBD disetujui harus konsultasi ke Kemendagri yang dihadiri oleh tim anggaran pemma dan Badan Anggaran (Banang) DPRD Kalbar. APBD hasil konsultasi itu harus disampaikan segera ke DPRD dengan tembusan ke

Banang DPRD Kalbar.

Pemprov, kata Setyo, hendaknya menindaklanjuti dan menertibkan rekening-rekening SKPD berdasarkan rekomendasi tindakan-lanjuti temuan audit BPK-RI wilayah Provinsi Kalbar.

Tidak hanya itu, kata Setyo, DPRD Kalbar segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti masalah aset-aset provinsi Kalbar. Lakukan penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dianggarkan melalui APBD Kalbar harus tepat waktu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Supayan tidak mengganggu siklus APBD selanjutnya.

Pejabat pemerintah Kalbar yang sedang menghadapi masalah hukum dan berstatus tersangka, lanjut Setyo, harus di nonaktifkan. Supaya tidak mengganggu kinerja SKPD yang dipimpinnya. Dan yang bersangkutan dapat berkonsentrasi untuk menghadapi masalah hukumnya.

Kemudian, Setyo juga memaparkan karena rumah sakit penyangga belum berfungsi optimal di kabupaten/kota, maka saat ini pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas tidak menda-



PANDANGAN AKHIR

Salah satu juru bicara fraksi di DPRD Kalbar menyampaikan pandangan akhirnya terhadap laporan badan anggaran DPRD Provinsi Kalbar tentang penanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2010 Provinsi Kalbar. FOTO: Yulan Mirza/Borneo Tribune

patkan pelayanan di rumah sakit Sudarso. Maka pemerintah provinsi Kalbar diharapkan melakukan koordinasi secara terpadu mengenai pelayanan jamkesmas dengan pemerintah kabupaten/kota dan RS Sudarso.

Sementara pandangan akhir Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Tony Kurniadi men-

jelaskan fraksi PAN juga menerima dan menyetujui dengan beberapa catatan. Diantaranya, masalah aset, masalah kerugian Negara, segera direncanakan raperda tentang tata cara tuntutan ganti rugi, perlu adanya tranparansi anggaran, pembangunan perbatasan, prosentase belanja publik atau belanja langsung

mestilah lebih besar daripada belanja pegawai/belanja tidak langsung, agar keberpihakan Pemerintah Provinsi pada masyarakat benar-benar tampak adanya, dan terakhir sudah seharusnya Gubernur melakukan pengangkatan pimpinan SKPD itu dalam ditempatkan sesuai dengan keterampilan. □